

Financial Accounting System Untuk Mencapai Good Governance Pemerintah Kota Makassar

Financial Accounting System To Achieve Good Governance Makassar City Government

Sarah Alifa¹, Haliah², Andi Kusumawati³

srhalifa@gmail.com¹, haliah_feuh@yahoo.com², andikusumawati@fe.unhas.ac.id³

Universitas Hasanuddin Makassar Indonesia

Abstract.

This study discusses the financial accounting system to achieve good governance of the Makassar City Government. The formulation of the problem in this research is how to apply accrual-based accounting standards in the local government of Makassar City and how to implement the public sector financial accounting system in achieving good governance in the Makassar City government. This study aims to determine the extent to which the application of accounting standards and the implementation of the public sector financial accounting system in achieving good governance in the local government of Makassar City. The benefits of research are the benefits of theory and practice. This type of research is qualitative research. Sources of data used in this study are primary data and secondary data. Methods of data collection using interviews, documentation and library research. The results showed that the financial accounting system in the Makassar city government, especially at the Makassar City Regional Development Planning Agency (BAPPEDA) was in accordance with the rules set by the government and also the financial reporting was in accordance with the principles of good governance (transparency and accountability).

Keywords: Accounting System, Implementation, Good Governance.

Abstrak.

Penelitian ini membahas tentang *financial accounting system* untuk mencapai *good governance* Pemerintah Kota Makassar. Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan standar akuntansi berbasis akrual di pemerintahan daerah Kota Makassar dan bagaimana implementasi sistem akuntansi keuangan sektor publik dalam mencapai *good governance* di pemerintah daerah Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar akuntansi dan implementasi sistem akuntansi keuangan sektor publik dalam mencapai *good governance* pada pemerintahan daerah Kota Makassar. Manfaat penelitian yaitu manfaat teori dan praktik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan riset pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan di pemerintahan kota Makassar khususnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Makassar sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan juga pelaporan keuangannya sudah sesuai dengan prinsip *good governance* (transparansi dan akuntabel).

Kata Kunci: Sistem Akuntansi, Implementasi, *Good Governance*.

Pendahuluan

Kualitas laporan keuangan selalu menjadi pusat perhatian setiap entitas termasuk entitas publik. Pemerintah diharapkan dapat menyusun laporan keuangan yang mengandung informasi berkualitas untuk publik sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja pemerintah. Pembuatan laporan keuangan guna sebagai bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas berupa keterbukaan pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik (Zeyn dan Elvira, 2011).

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah

terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). SAP merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dapat tercapai. Peraturan yang diterbitkan pemerintah dalam mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan yaitu tertuang dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang SAP yang kemudian akan digantikan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual dan diterapkan selambat-lambatnya tahun 2015.

Laporan keuangan harus disusun sesuai Standar Akuntansi agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan karakteristik kualitatif yang disyaratkan PP No. 71 Tahun 2015, yakni relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami oleh pengguna informasi. *Good governance* muncul dan berkembang diberbagai negara untuk mengoreksi peranan pemerintah yang bersifat sentralistik dan bahkan otoriter, korup dan kolusif, kearah pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan yang berorientasi pada misi pemberdayaan masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, serta demokratisasi politik. (Rasul dan Sjahrudin, 2009).

Adanya kebijakan pemerintah tentang perluasan kewenangan otonomi daerah disertai reformasi birokrasi membawa angin segar bagi perkembangan pengelolaan administrasi publik. Dalam perkembangan administrasi publik di Indonesia mengalami perubahan secara drastis mengenai pelimpahan pengelolaan dan tanggungjawab telah diserahkan kewenangan dari pemerintah tingkat regional atau daerah (Kristiansen dkk., 2009). Terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengamanatkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan tertib, taat pada perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Organisasi sektor publik pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungan dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparansi, akuntabilitas dan berkualitas, serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah pada organisasi sektor publik dituntut agar memiliki tata kelola yang baik (*good governance*) untuk kepentingan masyarakat dan tanggap akan tuntutan lingkungannya. Prinsip *good governance* merupakan prinsip pokok yang harus diberlakukan diseluruh negara di dunia termasuk Indonesia (Nugraheni dkk., 2008). Spathis dkk., (2002) menyatakan bahwa adanya tuntutan masyarakat terhadap peningkatan transparansi dan konsistensi informasi yang dilihat dalam laporan keuangan. Oleh karena itu penerapan *good governance* dalam organisasi sektor publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas terbebas dari penyajian data yang belum sesuai dengan peraturan dan terbebas dari penyimpangan-penyimpangan.

Pelaksanaan dan pengembangan prinsip tata kelolah pemerintah yang baik tidak mudah. Selain itu, dalam implikasinya membutuhkan komitmen dan optimisme besar dari seluruh komponen bangsa, yang melibatkan tiga pilar bangsa yaitu aparat pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam rangka memelihara solidaritas untuk mencapai pemerintah yang baik.

Good governance sebagai sistem yang diterapkan pada pemerintah demi terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien, sehat dan bermutu, serta memberikan dampak yang baik bagi pemerintah dan

masyarakat. Sistem pemerintah ini muncul di era reformasi karena tuntutan terhadap keadaan pemerintah pada era orde baru dengan berbagai permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden. mengemukakan dalam skripsi (Pertiwi dan Darma, 2017) bahwa *good governance* sebagai bagian dari agenda reformasi pada dasarnya merupakan suatu kondisi ideal yang diharapkan terwujud pada setiap aspek pemerintah yang berinteraksi pada masyarakat. Penerapan *good governance* dimaksudkan agar terciptanya keterbukaan informasi, adanya pertanggungjawaban pemimpin, perlakuan adil bagi setiap pegawai dalam menjalankan kewajiban dan menerima hak-haknya sebagai pegawai maupun adanya keterlibatan dari seluruh pegawai dalam pengembangan organisasi menjadi lebih baik lagi.

Berdasarkan di pemerintahan daerah Kota Makassar, pengelolaan keuangan sudah dilaksanakan berdasarkan akuntansi sektor publik, namun penerapan *good governance* masih belum jelas kelihatan, karena beberapa unsur *good governance* belum diungkap dan dalam pelaporan keuangan khususnya, sehingga pernyataan *good governance* masih perlu dipertanyakan. Dalam menyikapi hal tersebut BAPPEDA Kota Makassar harus melakukan peningkatan kualitas profesionalisme aparatur pengelola keuangan agar mampu beradaptasi dan menjalankan tugas secara profesional, memegang teguh etika birokrasi dan mampu menghasilkan laporan keuangan yang akurat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka memberikan informasi yang benar, baik kepada atasan maupun kepada masyarakat Kota Makassar.

Adapun penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Akuba, (2013). Tentang Analisis Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Gorontalo. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintahan gorontalo belum menerapkan PP No. 71 tahun 2010 dikarenakan masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhinya. Kemudian penelitian lainnya yang dilakukan oleh Dadang Suhendra, (2016). Tentang Pengaruh Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap Keberhasilan Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja APBD Kabupaten/Kota Se-Wilayah III Cirebon dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderator. Berdasarkan hasil penelitiannya ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi penganggaran berbasis kinerja 45,1%-nya dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yang dimoderasi oleh Komitmen Seluruh Komponen Organisasi, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang lain.

Akhir-akhir ini, organisasi sektor publik dituntut untuk terus melakukan upaya perbaikan dalam pengelolaan sumber daya publik untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Tata kelola pemerintah yang baik atau *good governance* merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan efisien. Lemahnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) di instansi pemerintahan ditandai dengan tidak efektifnya organisasi dan birokrasi, rendahnya kualitas pelayanan terhadap publik, sulitnya pemberantasan korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN). *Good Governance* pada sektor publik diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan *stakeholders*, terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik, dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti sumber daya alam, keuangan, dan manusia bagi kepentingan yang dilaksanakan dengan mengacu pada asas: keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Maka dari itu pemerintah (BAPPEDA) Kota Makassar terus melakukan pengevaluasian terhadap sumber daya dalam pemerintahannya agar lebih efektif dan efisien dalam pelaporannya.

Sepengetahuan peneliti masih sedikit penelitian tentang analisis sistem akuntansi keuangan sektor publik dalam mencapai *good governance*. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian untuk mengetahui tentang “*financial accounting system* untuk mencapai *good governance* Pemerintah Kota Makassar”

Metode

Adapun metode analisis dalam penelitian ini adalah menggunakan Teknik Analisis Interaktif Miles & Huberman. Langkah-langkah dalam melakukan teknik analisis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi yang kemudin dituliskan dalam catatan lapangan yang berisi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan serta dialami dan juga temuan tentang apa yang dijumpai selama penelitian yang kemudian ditulis dalam catatan lapangan, memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, file dan lain sebagainya.

2. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan pada saat peneliti menyeleksi pertanyaan-pertanyaan hasil wawancara dengan informan. Peneliti memilih dan memilah pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan konteks penelitian. Selain itu, peneliti berupaya mengurangi pemborosan kata sejauh tidak mengurangi inti atau makna dari pertanyaan atas informan. Hal ini dilakukan supaya data-data yang disajikan tetap fokus dalam menjawab permasalahan penelitian.

3. Penyajian Data

Komponen ini melibatkan langkah-langkah mengkoordinasi data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan kelompok data yang lain sehingga seluruh data yang di analisis benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan. Hal ini dikarenakan dalam penelitian kualitatif, data biasanya beragam perspektif dan terasa bertumpuk, maka penyajian data pada umumnya diyakini sangat membantu proses analisis. Peneliti melakukan proses ini saat menyajikan data-data hasil wawancara, observasi, dan sumber tertulis sesuai fokus penelitian. Dengan kata lain, peneliti mengelompokan itu tidak lagi terlihat saling bertumpuk karena telah disesuaikan dengan kategori berdasarkan fokus penelitian. Data disajikan dalam bentuk narasi. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini, peneliti pada dasarnya mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola data yang ada atau kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Peneliti masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau realitas yang diteliti.

Pembahasan

Mewujudkan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Pemerintah Daerah Kota Makassar

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah maka Pemerintah Daerah harus menerapkan Akuntansi Berbasis Akrua pada tahun 2015. Dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi tersebut, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku bagian dari Pemerintah Kota Makassar menyusun laporan keuangan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kredibilitasnya yang pada gilirannya dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan mengungkapkan secara penuh kegiatan yang ada dengan sumber daya yang menunjukkan ketaatan pada Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan Ibu Ivani diatas menunjukan bawah aparatur pengelolah keuangan Pemerintah Kota Makassar pada umumnya telah memahami pengertian dasar dari akuntansi berbasis akrua, namun ketika pada tahap pelaksanaannya banyak staf yang pada awalnya mereka memahami hanya basis kas dan ketika basis akrua hadir karena ada item laporan keuangan yang bertambah menjadi masalah utama bagi para pengelolah keuangan pemerintah Kota Makassar dalam mengimplementasikan peraturan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi berbasis akrua ini. Kemudian hadirnya basis akrua ini seolah-olah menjadi topik utama yang menjadikan akrua ini sebagai sesuatu hal yang rumit. Setelah menerapkannya akuntansi berbasis akrua semua aparatur keuangan pemerintah Kota Makassar dituntut mengikuti pelatihan-pelatihan terkait akrua ini untuk mempermudah dalam memahami dan pelaporan keuangan. Ketika akrua hendak dilakukan sepenuhnya untuk menggambarkan berlangsungnya esensi transaksi atau kejadian, maka kelebihan yang diperoleh dari penerapan akrua adalah tergambaranya informasi operasi atau kegiatan. Dalam sektor komersial, gambaran perkembangan operasi atau kegiatan ini dituangkan dalam Laporan Laba Rugi. Sedangkan dalam akuntansi pemerintah, laporan sejenis ini diciptakan dalam bentuk Laporan Operasional atau Laporan Surplus/Defisit. Dengan demikian, perbedaan kongkrit yang paling memerlukan perhatian adalah jenis/komponen laporan keuangan.

Perbedaan mendasar SAP PP 24/2005 dengan SAP Akrua terletak pada PSAP 12 mengenai Laporan Operasional. Entitas pemerintah melaporkan secara transparan besarnya sumber daya ekonomi yang didapatkan, dan besarnya beban yang ditanggung untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Surplus/defisit operasional merupakan penambah atau pengurang ekuitas/kekayaan bersih entitas pemerintahan bersangkutan.

Pemerintah Daerah (Wali Kota) Makassar telah menerapkan sistem akuntansi berbasis akrua sejak tahun 2015 sampai saat ini. Artinya dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrua dapat menghasilkan laporan keuangan yang dipercaya dan lebih akurat untuk pengambilan keputusan ekonomi. Kemudian pegawai dan staf pemerintah dituntut untuk memahami sistem ini yang walaupun banyak kesulitan dalam pelaporannya.

Kemudian berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Biro Keuangan serta beberapa staf pegawai Bagian Keuangan Pemerintah daerah khususnya BAPPEDA

dan BPKAD Kota Makassar, Penulis menilai bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar sudah cukup memadai yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pelaksanaan administrasi keuangan daerah.
- b. Adanya Review berjenjang dalam pemberian persetujuan atas suatu transaksi.
- c. Adanya proses Pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan.

Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Sektor Publik dalam Mencapai Good Governance di BAPPEDA Kota Makassar

Transparansi artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi, atau ditunda tunda pengungkapannya. Tujuan penyajian laporan keuangan daerah adalah memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Sedangkan para pengguna laporan keuangan mempunyai bermacam-macam kebutuhan dalam laporan keuangan itu sendiri. Oleh karena itu laporan keuangan yang disusun pemerintah harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara lengkap sesuai dengan peraturan yang ada dan syarat-syarat agar laporan keuangan yang disajikan dapat memenuhi harapan pengguna. Serta kemampuan staff atau aparatur pemerintahan dalam transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Bapak Usman bahwa penyusunan laporan keuangan yang harus jujur suatu bentuk kebutuhan transparansi yang merupakan syarat pendukung adanya akuntabilitas yang berupa keterbukaan (*openness*) pemerintah atas aktivitas pengelolaan sumber daya publik. Dengan adanya sistem yang terprogram langsung melalui IT maka hasil dari laporan keuangan terpercaya atau terintegrasi dapat mencegah kecurangan.

Transparansi merupakan prinsip yang harus ada dan meliputi keseluruhan bagian pengelolaan keuangan baik dari proses perencanaan, pelaksanaannya. Transparansi informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami mencegah timbulnya penyimpangan tindakan aparatur publik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat artinya, informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan, transparansi mengisyaratkan bahwa laporan keuangan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah menjalankan amanat rakyat.

Berdasarkan Pernyataan Ibu Andi Herni dapat disimpulkan bahwa bagi golongan masyarakat yang tidak paham teknologi masa kini telah di sediakan papan pengumuman terkait penyelenggaraan program-program kerja dan untuk itu masyarakat di beri akses melalui membuka website yang di sediakan. Dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah. Dalam mendukung terwujudnya *good governance* masyarakat sebagai salah satu alat untuk mendorong berjalannya prinsip-prinsip *good governance*. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat harus dibuat secara terbuka. Serta

adanya sosialisasi pengetahuan teknologi atau e government kepada masyarakat umum yang masih belum paham dengan IT.

Akuntabilitas publik keuangan daerah adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan daerah kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk tau (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept information*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*) dapat terpenuhi.

Unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah cara pengelolaan keuangan daerah secara berdaya guna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini. Hal tersebut sesuai dengan *Agency Theory* yang membahas kontrak antara principal dan Agen.

Jensen dan Meckling (1976:1) menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agent, sehingga agent tidak selamanya mengikuti keinginan prinsipal. Hubungan keagenan tersebut juga terjadi di pemerintahan antara rakyat sebagai agen dan pemerintah sebagai prinsipal. Pemerintah dapat melakukan kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan penguasa dan mengorbankan kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mengurangi konflik maka diperlukan monitoring oleh prinsipal atas apa yang dilakukan oleh agen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Andi Herni tentang bentuk pengawasan masyarakat dengan ikut berpartisipasi dalam proses penganggaran dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Kota Makassar khususnya sebagai prinsipal memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap agen atau pemerintah dalam pengelolaan keuangan demi kesejahteraan principal. *Theory agency* dapat digunakan untuk menghubungkan tanggungjawaban sektor publik dimana masyarakat berperan sebagai pemberi amanah sekaligus pemilik dan pelanggan (*customer*) dan tugas pemerintah daerah dengan peran dan fungsi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat (*civil service*).

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat mengambil kesimpulan bahwa : Sistem dan prosedur keuangan pemerintah daerah kota makassar telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrual yaitu meningkatkan kinerja transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, melalui pengamatan dapat dilihat bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar telah menerapkan sistem dan prosedur yang baik. Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah Kota Makassar atau (BAPPEDA) dan BPKAD Kota Makassar sudah baik, yaitu adanya keterbukaan informasi dan adanya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam proses penganggaran. Perwujudan akuntabilitas dalam proses pengelolaan keuangan akuntansi yang sistem berbasis akrual telah di implementasikan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Serta bentuk pertanggungjawaban dalam program kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- Aliyah, S., dan Nahar., A. 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara. *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 8(2): 97–189.
- Furqani, A. 2010. *Pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan good governance (studi pada pemerintahan Desa Kalimo'ok Kecamatan Kalianget Kabupaten Sumenep)*. Surabaya: UPN Jatim.
- Kristiansen, Stein, Dwiyanto, A., Pramusinto, A., dan Putranto, E. A. 2009. Public Sector Reforms And Financial Transparency: Experiences From Indonesian Districts. *A Journal Of International And Strategic Affairs*, 31(1): 64–87.
- Mardiasmo. 2009. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nugraheni, Purwaniati, dan Subaweh, I. 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas.
- Pertiwi, dan Darma, S. H. 2017. Analisis Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Pada Pemerintah Desa Nepo Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar*.
- Rasul, dan Sjahrudin. 2009. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, 21(3): 409–628.
- Sadjiarto, A. 2000. Akuntabilitas dan pengukuran kinerja pemerintahan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(2): 138–150.
- Spathis, C., Doumpou, M., dan Zopounidis, C. 2002. Detecting Falsified Financial Statements: A Comparative Study Using Multicriteria Analysis and Multivariate Statistical Techniques. *The European Accounting Review*, 11(3): 509–535.
- Yahya, I. 2006. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Sistem Teknik Industri*, 7(4): 27–29.
- Yuliani, S., Nadirsyah, dan Bakar., U. 2010. Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi*, 3(2): 206–220.
- Zeyn, dan Elvira. 2011. Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan*, 1(1): 21–37.